

## **BAB II** **KAJIAN TEORITIK**

### **A. Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada sekolah, dan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat<sup>10</sup>.

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut sifatnya situasional dan kondisional sesuai dengan masalah yang dihadapi dan politik yang dianut pemerintah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu

---

<sup>10</sup> Mulyasa E., 2007 *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.h.33

wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya.

Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Made Pidarta, manajemen merupakan proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang dimaksud sumber di sini ialah mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan-bahan, uang, dan sarana. Semuanya diarahkan dan dikoordinasi agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan.

Menurut Mulyasa karakteristik manajemen berbasis sekolah antara lain:

a. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah

Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik sesuai tuntutan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Dalam manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Kepemimpinan Yang Demokratis dan Profesional

Dalam manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan program program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.<sup>11</sup>

d. *Team Work* yang Kompak dan Transparan

Dalam manajemen berbasis sekolah, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah.

---

<sup>11</sup> *ibid.* h.33

Keberhasilan manajemen berbasis sekolah merupakan hasil sinergi dari kolaborasi tim yang kompak dan transparan.

Menurut Mulyasa manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.<sup>12</sup>

Menurut Mulyasa manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* 2003. *Op.cit.*h.24

Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Manajemen sekolah pada hakekatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan.<sup>13</sup>

Ruang lingkup di bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Komponen-komponen yang harus dikelola dengan baik dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah, menurut Mulyasa, adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran.

b. Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*.h.25

efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

c. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*.h.45

d. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.<sup>15</sup>

**B. Komite Sekolah**

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*.h.49

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Menurut Wahyu Sumidjo dalam buku *kepemimpinan kepala sekolah*, tujuan pokok pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat setempat adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti didalam kegiatan sekolah.<sup>16</sup> Sebagaimana diungkapkan dimuka bahwa orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anaknya dan karena keterbatasannya menyerahkan tanggung jawab orang tua tersebut.

Adapun bentuk keterlibatan orang tua dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan sekolah menengah pertama, dalam kegiatan instruksional sekolah menengah pertama dalam aktifitas belajar dirumah, dalam menjalin hubungan komunikasi antara sekolah dan rumah, dan dalam mengelola sekolah menengah pertama.<sup>17</sup>

Masyarakat adalah siapapun baik perorangan maupun kelompok, baik yang berdomisili disekitar sekolah menengah pertama maupun tidak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang relevan dan kongruen dengan program sekolah menengah pertama. Berbeda dengan sekolah umum, masyarakat sekolah menengah pertama adalah meliputi pemerintah daerah, kelompok orang tua murid, yayasan, dewan sekolah menengah pertama madrasah, pesantren, asosiasi profesi, LSM, masyarakat umum, dan lembaga

---

<sup>16</sup> Wahyu Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 334

<sup>17</sup> Daryono, *Manajemen Partisipasi Masyarakat (Pengembangan Madrasah dan Keterlibatan Masyarakat)* dalam Inservice training KKM MTs MI, Depag RI, Jakarta, 2001, h.125-126



sosial dan lain-lain yang selanjutnya di sebut dengan lingkungan eksternal sekolah menengah pertama. Adapun firman Allah yang mendukung peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah surat Al Imron ayat 104 yang berbunyi:

Dan hendaklah ada diantara kamu satu golongan yang mengajak manusia, kepada kebaikan menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, mereka itulah yang memperoleh kebahagiaan (QS. Al Imron:104).<sup>18</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ  
الْمُفْلِحُونَ (QS. Al Imron:104). هُمْ

Firman Allah tersebut di atas menyuruh kepada kita semua Untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dengan kata lain ikut berpartisipasi dalam pendidikan berarti kita telah melaksanakan firman Allah tersebut.

Hubungan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah menengah pertama sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah menengah pertama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Hal ini penting karena sekolah menengah pertama memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa sekolah menengah pertama untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 1989), h.93

program-program pendidikan yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat dimaksudkan untuk

- 1) Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap sekolah,
- 2) Menilai program sekolah,
- 3) Mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik,
- 4) Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era globalisasi,
- 5) Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah,
- 6) Memberi tahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah,
- 7) Mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Sedangkan bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Untuk kepentingan tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik dan media seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat-menyurat, buku penghubung, buletin sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun

orang tua.<sup>19</sup>

Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Memelihara kelangsungan hidup sekolah menengah pertama.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama.
- 3) Memperlancar kegiatan pembelajaran, serta
- 4) Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah.

Sementara berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk :

- 1) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat,
- 3) Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta
- 4) Memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil, makin meningkat kemampuannya dan ketakwaannya.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta, cet. II, 2005), h. 66

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 75

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sekolah.<sup>21</sup>

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003 ), h. 28.

## 1. Fungsi Komite Sekolah

Komite sekolah berfungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Merumuskan penjabaran visi dan misi sekolah menengah pertama.
- e. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada sekolah tentang kriteria kepala sekolah
- f. Menyusun program operasional dan penjabaran kebijakan pendidikan pada sekolah.
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- h. Merumuskan penjabaran dan operasional kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan dan kriteria fasilitas pendidikan.
- i. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- j. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Direktur Jenderal ..., *op.cit*, h 110

Komite sekolah dengan semangat tinggi merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam 4 bidang peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik.<sup>27</sup> Ketua komite sekolah adalah penguasa setempat, dan terlibat secara penuh dalam perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah. Dari setengah jumlah komite sekolah yang diteliti mengikuti SK dengan jumlah anggota minimum 9 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang. Sebagian besar komite mempunyai pengurus 3 orang, dan meniru struktur organisasi seperti disarankan. Kepala sekolah secara jelas diharapkan menjadi manusia sumber untuk komite, tidak dapat menjadi anggota komite.

Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite. Paling banyak ada 3 orang wanita terwakili dalam komite, meskipun demikian 43 % bendaharawan adalah wanita. Beberapa komite, ada yang tidak mempunyai anggota wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota komite, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Kelihatannya, pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki. Sebagian besar anggota komite mempunyai minat menjadi anggota komite di sekolah anaknya. Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah tidak melalui pemilihan. Beberapa orang anggota komite diangkat kembali menjadi anggota komite dan tugasnya

diperluas. Banyak komite yang sudah mempunyai SK dari kepala sekolah, sedangkan komite-komite yang baru dibentuk (tahun 2003) SK-nya masih sedang diproses. Sebagai mediator dengan masyarakat komite sekolah melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah dalam hal ini melalui pembentukan paguyuban kelas.

Pertemuan-pertemuan formal, dilakukan secara regular, tetapi tidak sering. Sering mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah.

Semuanya itu harus didasari dengan semangat profesionalisme sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِدَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ  
 بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ  
 إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah saw, "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (H.R. Bukhari).

Dari sabda Nabi dapat dipetik pelajaran bahwa suatu profesi harus dijalankan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Apabila tidak sesuai maka akan terjadi sebuah kehancuran (kegagalan).

Sehubungan dengan fungsi dan tujuan tersebut, usaha untuk mencapai efisiensi dan epektifitas kerja, sangat dirasakan perlu adanya profesionalisme guru. Oleh karena itu seorang guru diwajibkan mengetahui fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Isra' 84:

سَيِّئًا أَهْدَىٰ هُوَ بِمَنْ أَعْلَمُ فَرُبُّكُمْ شَاكِلِيهِ عَلَىٰ يِعْمَلُ كُلُّ قَلِّ

(ءارسلا: 84)

Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Al-Isra' 84).<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Komite Sekolah

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai

<sup>23</sup> Soenarjo, dkk, *op. cit*, h. 437.



program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>24</sup>

Sedangkan dibentuknya komite sekolah bertujuan:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di suatu pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntable, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>25</sup>

Tujuan awal adalah untuk menyusun struktur Manajemen Berbasis Sekolah sehingga dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kegiatan rutinitas dengan membuat komite sekolah yang bertanggung jawab atas keputusan pada tingkat sekolah. Pada akhirnya, beberapa hal berikut harus diselesaikan. Pertama, Dinas Pendidikan harus membuat rencana strategis daerah dengan hal-hal berikut:

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> Larry J. Reynolds, *Kiat Sukses Manajemen Berbasis Sekolah, Pedoman Bagi Praktisi Pendidikan*, (Jakarta: CV. Diva Pustaka, 2005),h. 121-122

- a. Mengidentifikasi tekanan-tekanan dari luar maupun dalam yang terjadi di daerah.
- b. Menetapkan kebutuhan siswa pada saat sekarang dan selanjutnya.
- c. Menjelaskan keyakinan dan nilai-nilai pendidikan.
- d. Mengembangkan visi masa depan bersama
- e. Menetapkan harapan dan parameter sekolah
- f. Mengidentifikasi kebutuhan manajemen sekolah
- g. Memberikan dukungan terhadap layanan dan *leadership*.

Kedua, harapan terhadap peran kepala sekolah yang lebih besar diterangkan di bawah ini:

- a. Memenuhi kebutuhan *leadership* dan manajemen sekolah dengan meningkatkan efektivitas organisasi sekolah dan membangun konteks organisasi yang akan memudahkan kesuksesan Manajemen Berbasis Sekolah.
- b. Memberikan hasil yang dapat membantu Dinas pendidikan dan komite sekolah untuk memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi dan kesuksesan Manajemen Berbasis Sekolah dalam *setting* sekolah tertentu. Masukan tersebut dapat berupa penilaian konteks perubahan, penilaian kebutuhan dan manajemen sekolah, serta penilaian iklim organisasi sekolah.

Ketiga, hubungan kewenangan terjalin antara Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan komite sekolah.<sup>26</sup> Komite sekolah dengan semangat

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 123-124

tinggi juga merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam 4 bidang peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahteraannya, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik. Hanya satu dari keempat peran komite sekolah -mediator antara sekolah dan masyarakat yang dianggap sebagai kriteria keefektifan komite. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden.<sup>27</sup>

### 3. Pembentukan dan Pola Komunikasi Komite Sekolah

Menurut keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/409/2003 Pedoman Pembentukan Komite sekolah ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemilihan atau pembentukan.

#### a. Prinsip pembuatan komite sekolah

Komite sekolah dibentuk dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Transparansi, akuntabilitas dan demokrasi
- 2) Merupakan mitra satuan pendidikan.

#### b. Mekanisme pembentukan komite sekolah

- 1) Pembentukan panitia persiapan

Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara

---

<sup>27</sup> <http://mbeproject.net/mbe510.html>, *loc. cit*

pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM) yang peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri) dan orang tua peserta didik.

2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Mengadakan forum sosialisasi masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Madrasah yang telah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.

b) Menyusun dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.

c) Menyeleksi calon-calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.

d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.

e) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah.

f) Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan.

3) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk.

c. Penetapan pembentukan komite sekolah

Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam

AD dan ART.<sup>28</sup> Kunci dalam membangun struktur dan keanggotaan adalah dengan cara memaksimalkan kekuatan kelompok dan meminimalkan kelemahannya. Langkah pertama dalam tahap pembentukan adalah menentukan bagaimana menyusun struktur Komite Sekolah dan menentukan siapa yang akan menjalankan dan membantu komite. Pada satu sisi, panitia perencana dapat dibentuk untuk membangun komite sekolah.

Kredibilitas komite sekolah dan tingkat kepercayaan awal komunitas sekolah terkait dengan bagaimana kelompok ini dipilih pada awalnya. Pendekatan apa pun yang digunakan untuk membentuk komite sekolah yang baru, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan elemen-elemen berikut. Elemen-elemen ini harus dijelaskan dengan tujuan untuk menetapkan kerangka eksternal yang jelas supaya komite sekolah dapat berfungsi dengan baik.

- a. Definisi tujuan komite sekolah.
- b. Penjelasan wewenang komite sekolah dalam membuat keputusan.
- c. Penjelasan terhadap apa yang harus dilakukan komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.
- d. Daftar kriteria efektifitas sekolah yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan.
- e. Daftar harapan Dinas Pendidikan terhadap Manajemen Berbasis Sekolah.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen -----, op.cit*, h 110

- f. Daftar aspek keputusan khusus yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan kepada komite sekolah.
- g. Daftar program lanjutan tingkat daerah di sekolah.
- h. Definisi tanggung jawab decision-maker bagi dewan penasehat dan kelompok pembuat keputusan lainnya.<sup>29</sup>

Tugas kedua adalah memusatkan pada struktur dan keanggotaan awal komite sekolah. Beberapa pertimbangan berikut sangat penting untuk menjelaskan secara rinci kepada calon anggota mengenai faktor-faktor apa saja yang membantu komite sekolah. Di sisi lain setting sekolah yang khusus akan menentukan banyaknya kriteria yang diajukan kepada anggota kelompok. Sejarah sekolah, masalah dan persoalan sekolah, tingkat keterlibatan sebelumnya dalam kelompok penasehat dan pembuat keputusan, pengaruh masa lalu, serta kekuatan individu dan kelompok merupakan beberapa pertimbangan yang penting. Namun, disamping kriteria diatas, ada tiga kriteria tambahan yang dianggap sesuai dengan tujuan dan proses yang akan diuraikan selanjutnya.

*Pertama*, anggota kelompok dipilih berdasarkan potensi mereka dalam hal *leadership*. *Kedua*, anggota yang potensial harus memiliki minat dan kemampuan untuk berkonsentrasi pada pandangan sekolah, yaitu pandangan mengenai masalah dan pertimbangan bagi peningkatan sekolah. *Ketiga*, anggota yang potensial harus menunjukkan minat dan kepeduliannya pada semua di sekolah. Kesuksesan dan keefektifan program pembelajaran layanan sekolah tergantung pada kemampuan

---

<sup>29</sup> Larry J. Reynolds, *op. cit*, h 125

siswa memaksimalkan kesuksesan mereka. Komite sekolah diharapkan menjadi pusat siswa dan bukan menjadi pusat kaum dewasa dan menekankan pandangan “swasta sebagai konsumen”.<sup>30</sup>

Untuk itu besarnya ukuran kelompok *decision-maker* memiliki pengaruh langsung kemampuan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Bila partisipasi dan rasa kepemilikan merupakan tujuan, seringkali sekolah mencoba memasukkan wakil-wakilnya dari setiap kelompok *stakeholders* dalam sekolah negeri.

Ada beberapa sekolah yang menerapkan aturan bahwa satu wakil merupakan hal yang baik, menyatakan bahwa setiap orang mesti diikutsertakan. Menghindari masalah ukuran kelompok akan membantu tujuan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi jelas. Alasan pertama adalah karena tugas-tugas tim sekolah terpusat pada penyelesaian tugas-tugas perencanaan strategis, menciptakan visi bersama dan percaya bahwa kelompok kecil jauh lebih baik. Kelompok lebih baik beranggotakan tidak lebih dari 8-10 orang. Dengan mengikut sertakan kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua, maka komite sekolah dapat memperoleh 10 anggota dengan cepat. Alasan kedua adalah jumlah panitia yang kurang dikarenakan para guru biasanya sudah terikat dalam suatu kepanitiaan tertentu yang sudah barang tentu menyita banyak waktu. Kondisi ini dapat kita jumpai pada hampir semua sekolah.

Alasan terakhir adalah kelompok kecil biasanya memulai dengan perlahan akan lebih mudah mengatur jadwal pertemuan dan membangun

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 126-127

hubungan kerja yang positif bila hanya terdapat beberapa orang saja di dalamnya. Komite sekolah harus memusatkan kesuksesannya pada langkah awal perkembangan kelompok.<sup>31</sup>

Salah satu kekuatan potensial kelompok *decision-maker* adalah banyaknya pandangan, pengetahuan, dan ketrampilan anggota kelompok yang dihasilkan. Karena komite sekolah bertanggung jawab atas perencanaan strategis, visi bersama tentang masa depan, dan efektivitas program pendidikan dan layanan bagi semua siswa di sekolah, maka komite sekolah harus dapat merefleksikan keberagaman komunitas yang terdiri dari orang tua, siswa, dan dewan guru/staf. Kredibilitas dan legitimasi Manajemen Berbasis Sekolah tergantung pada hal ini.

Salah satu ciri yang menentukan produktifitas kelompok dan kepuasan setiap anggota adalah status formal mereka yang berbeda. Bila komite sekolah menggunakan hierarki peran formal yang tradisional dalam organisasi, maka mereka menekankan pada pola-pola lama dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki status formal yang paling tinggi. Hal ini dapat mengganggu kemampuan Manajemen Berbasis Sekolah untuk tampil sebagai agen perubahan yang signifikan dalam struktur pembuat keputusan dan proses sekolah daerah. Hal ini bisa terjadi dalam beberapa cara. *Pertama*, posisi formal kepala sekolah “yang lebih tinggi” dari pada guru dan anggota dewan guru serta keinginan kepala sekolah untuk melanjutkan kontrol dan pemenuhan akan berakibat pada usaha-usaha untuk menguasai kelompok.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 128-129



*Kedua*, beberapa sekolah percaya pada Manajemen Berbasis Sekolah tetapi tidak mendorong antusiasme pada orang tua dan anggota masyarakat yang ikut serta sebagai anggota komite sekolah *Ketiga*, para siswa memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat kecil di sekolah bila membahas mengenai prioritas-prioritas bagi peningkatan sekolah. Pada saat yang sama, para pendidik lebih peduli pada siswa yang tidak menginginkan tanggung jawab yang lebih. *Keempat*, pada beberapa daerah, anggota-anggota dewan sekolah juga menjadi anggota-anggota tim sekolah. Keanggotaan ganda ini seharusnya dihindari dalam tingkat *decision making*. Anggota-anggota sekolah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam kapasitas lingkungan daerah.<sup>32</sup>

Harapan awal seperangkat aturan bagi komite sekolah merupakan hal yang penting dan mengenali kontribusi potensial yang dimiliki setiap orang maupun kelompok yang ia wakili. Namun pada umumnya, aturan dalam kelompok haruslah berbentuk pertanyaan awal tentang berbagai kelompok diharapkan untuk bekerja sama. Pada saat tim sesungguhnya telah terbentuk, pernyataan awal ini harus diperbaiki. Secara esensial, aturan kelompok bagi setiap partisipasi anggota harus sesuai dengan perilaku kepala sekolah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan. Wilayah terakhir selama pembentukan komite sekolah adalah waktu, lokasi dan frekwensi pertemuan komite sekolah. Sangat penting untuk memberikan pandangan mengenai masalah komite waktu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h 129-130

dan perjalanan kepada anggota yang terlibat di dalamnya.<sup>33</sup>

#### 4. Peranan Komite Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing–masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 54 dikemukakan :

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah yang berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 121-132

madrasah

2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis
3. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/2002, keberadaan komite sekolah secara kontekstual berperan sebagai berikut :

- a. Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Dalam perannya sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, Dewan Pendidikan memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan. Fungsi tersebut itu dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di daerahnya. Hal ini penting, sebab di tengah era otonomi daerah sekarang ini, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi alat ukur dalam keberhasilan kebijakan dan program pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Untuk itu,

sebagai badan atau lembaga yang non-struktural, Dewan Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat tersebut, yang kemudian setelah diolah dan dianalisis kenyataannya secara objektif, akan menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dalam merumuskan berbagai program pendidikan di daerahnya.

Keputusan yang telah dihasilkan dalam program kerja tersebut, tentu membutuhkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar menjadi lebih transparan dan dapat menjadi umpan balik bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Dalam hal ini tentu Dewan Pendidikan memiliki fungsi yang teramat penting dalam ikut melakukan kegiatan sosialisasi tersebut.

Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, PBM, dan penilaian, Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah, termasuk dalam pengembangan dan strategi pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Sementara itu, Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses

pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain: SDM, Sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, Dewan Pendidikan berfungsi antara lain memberi pertimbangan kepada pengambil kebijakan pendidikan di daerah dalam upaya pengelolaan tenaga kependidikan (guru), baik yang menyangkut mengenai kualifikasi tenaga kependidikan (guru) yang diperlukan dan upaya dalam peningkatan mutu tenaga kependidikan (guru) itu sendiri. Fungsi lain dari Dewan Pendidikan dalam pengelolaan tenaga kependidikan (guru) adalah memberikan pertimbangan dalam hal rotasi dan mutasi di daerah. Di samping itu, Dewan Pendidikan juga berfungsi dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu dalam memberikan pertimbangan tentang persyaratan fasilitas sekolah melalui penetapan indikator teknis sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penetapan anggaran pendidikan, Dewan Pendidikan juga memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah.

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan

dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah.

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 2.1<sup>34</sup>

**Tabel 2.1. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Pertimbangan**

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen Pendidikan	Indikator Kinerja
Badan Pertimbangan ( <i>Advisory Agency</i> )	1. Perencanaan sekolah	1. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. 2. Memberikan masukan untuk pen-yusunan RAPBS. 3. Menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat) 4. Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS. 5. Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.
	2. Pelaksanaan Program a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian	1. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah. 2. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
	3. Pengelolaan Sumber daya Pendidikan a. SDM	1. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. 2. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang

<sup>34</sup>Mulyono *Op., Cit.* hal. 258-260

	b. S/P c. Anggaran	dapat diperbantukan di sekolah. 3. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. 4. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
--	-----------------------	--

Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Dalam perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*), Dewan Pendidikan berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah. Ini penting karena akan dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan dalam beberapa sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi, sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Melalui koordinasi dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah, yang kemudian dapat ditindak lanjuti bersama dengan Komite Sekolah melakukan memberdayakan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Dewan Pendidikan juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dapat

diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, sarana dan prasarana juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut. Harus diakui, anggaran pendidikan yang pada pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah harus merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam peranannya sebagai badan pendukung dapat diamati pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam  
Perannya Sebagai Badan Pendukung**

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen Pendidikan	Indikator Kinerja
Badan Pendukung ( <i>Supporting Agency</i> )	1. Pengelolaan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau kondisi ketenaga-an pendidikan di sekolah.</li> <li>b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.</li> <li>c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.</li> </ul>
	2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah.</li> <li>b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah.</li> <li>c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah</li> <li>d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.</li> </ul>
	3. Pengelolaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.</li> <li>b. Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.</li> <li>c. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.</li> <li>d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.</li> </ul>

Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

c. Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah *controlling*. Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan DPRD Komisi E Bidang Pendidikan. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Komite Sekolah berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan. Beberapa fungsi yang dapat dilakukan Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan.

Komite Sekolah juga dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Fungsi Dewan Pendidikan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pendidikan, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan Dinas Pendidikan. Dalam

pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut. Komite Sekolah dalam hal ini juga dapat melakukan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan. Yang menjadi perbedaan adalah objek yang diamati. Komite Sekolah dalam hal inik mengontrol pelaksanaan program di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program tersebut.

Penuntasan program wajib belajar 9 tahun akan menjadi komitmen bagi seluruh daerah. Karena itu, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tentu telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mencapai program tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak umur 6-15 tahun. Berbagai upaya pemerataan dan perluasan tersebut tentu bukan tanpa halangan, sebab persoalan seperti meningkatnya angka mengulang dan bertahan akan menjadi hal yang serius yang butuh penanganannya, yang akan berakibat pada keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di daerah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun juga tidak mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Dewan Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

Fungsi kontrol Dewan Pendidikan ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan Komite Sekolah, karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan. Yang tak kalah pentingnya dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah bagaimana dampak (*outcomes*) pendidikan, yang tercermin dalam hubungannya dengan keberhasilan keluaran pendidikan antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan angka tenaga kerja, dan situasi dan kondisi yang sosial budaya yang kondusif. Dampak pendidikan biasanya muncul setelah keluaran pendidikan (*output*) terjadi beberapa lama. Dalam pengembangan kinerja ini perlu diperhatikan sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan penilaian terhadap dampak pendidikan.<sup>35</sup>

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 2.3.

---

<sup>35</sup> Engkoswara & Aan Komariah. *Op., Cit.* hal. 300-303

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya  
Sebagai Badan Pengontrol**

Peran Dewan Pendidikan	Fungsi Manajemen Pendidikan	Indikator Kinerja
Badan Pengontrol ( <i>Controlling Agency</i> )	1. Mengontrol perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di lingkungan dinas pendidikan.</li> <li>b. Mengontrol kualitas kebijakan di lingkungan dinas pendidikan.</li> <li>c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan.</li> <li>d. Mengontrol kualitas perencanaan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan.</li> <li>e. Mengontrol kualitas program pendidikan.</li> </ul>
	2. Mengontrol pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengontrol organisasi pelaksana pendidikan.</li> <li>b. Mengontrol penjadwalan program.</li> <li>c. Mengontrol alokasi dana pelaksanaan program.</li> <li>d. Mengontrol sumber-sumber daya pelaksanaan program.</li> <li>e. Mengontrol partisipasi sekolah dan masyarakat terhadap program.</li> </ul>
	3. Memantau <i>output</i> (keluaran) pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau angka partisipasi pendidikan.</li> <li>b. Memantau angka mengulang.</li> <li>c. Memantau angka bertahan</li> <li>d. Memantau angka transisi</li> <li>e. Memantau hasil UN.</li> </ul>

	4. Memantau <i>out comes</i> (dampak) pendidikan	a. Memantau pertumbuhan ekonomi daerah. b. Memantau ketenagakerjaan di daerah. c. Memantau kondisi sosial budaya daerah.
--	--	--

Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

d. Komite Sekolah sebagai Mediator (*Mediator Agency*)

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan, koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan. Sebagai badan mediator, Dewan Pendidikan berfungsi dalam menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat, Dinas Pendidikan dengan DPRD Komisi E, serta Dinas Pendidikan dengan sekolah. Sebab selama ini kendala yang banyak dialami Dinas Pendidikan adalah minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Sementara yang lain, masalah yang dihadapi beberapa Dinas Pendidikan adalah kurang harmonisnya hubungan mereka dengan DPRD Komisi E. Karena itu, kehadiran Dewan Pendidikan menjadi sangat tepat terutama dalam fungsinya sebagai mediator.

Pada level sekolah, Komite Sekolah juga dapat berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya sering kali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua tersebut.

Peran sebagai mediator yang dilakukan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Peran ini adalah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi Dewan Pendidikan, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi umpan balik bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah.

Peran ini juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan program sekolah, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Sumber-sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat begitu besar, namun pemanfaatannya kurang optimal. Peran Dewan Pendidikan sebagai mediator dalam kaitannya dengan hal ini adalah memberdayakan kesediaan bantuan masyarakat untuk pendidikan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan.

Bagi Komite Sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Secara keseluruhan indikator kinerja Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai mediator dapat diamati pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Komite Sekolah dalam Perannya Sebagai Badan Penghubung (Mediator)**

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen Pendidikan	Indikator Kinerja
Badan Penghubung ( <i>Mediator Agency</i> )	1. Perencanaan	<p>a. Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah, dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan.</p> <p>b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan.</p> <p>c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah.</p>
	2. Pelaksanaan program	<p>a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat</p> <p>b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah</p> <p>c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah</p> <p>d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah</p>



<p>3. Pengelolaan Sumber Daya pendidikan</p>	<p>a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah.</p> <p>Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat.</p> <p>c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah.</p> <p>d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.</p>
--	--

Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

Lebih lanjut oleh Djam'an Satori yang dikutip oleh Mulyono mengatakan komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah, hal-hal tersebut meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan strategi sekolah, yaitu strategi pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang. Dalam dokumen ini juga dibahas visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi kajian isu-isu strategi sekolah perumusan program-program, cara pengendalian dan evaluasinya.
- b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah. Dalam perencanaan tahunan ini yang dibahas adalah program-program operasional yang merupakan

implementasi program prioritas yang dirumuskan dalam perencanaan strategi sekolah yang disertai perencanaan anggarannya.

- c. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para stakeholder sekolah terhadap berbagai aspek kehidupan sekolah yang ditunjukkan pada upaya-upaya perbaikan, kemajuan dan pengembangan sekolah.
- d. Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitasi pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah, dimaksudkan agar sekolah setidaknya memenuhi standart pelayanan minimum
- e. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
- f. Membahas hasil-hasil test standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standart minimum kompetensi siswa.
- g. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan sekolah tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas pendidikan nasional kabupaten/kota. Review sekolah merupakan kegiatan penting untuk

mengetahui keunggulan suatu sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya, atau sebaliknya untuk mengetahui kelemahan kelemahan sekolah disertai analisis-analisis factor-faktor penyebabnya. Review sekolah merupakan media untuk saling belajar antar sekolah dalam upaya meningkatkan kinerjanya masing-masing.

- h. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

- 1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- 2) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- 3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.

- 4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- 5) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- 6) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- 7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu<sup>36</sup>

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.

### C. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Windi Retno Bintari NIM 09108241031 yang berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Piuruh Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif yang memaparkan peran komite sekolah di tingkat sekolah dasar sebagai objek penelitiannya. Subjek penelitiannya adalah komite sekolah dan sumber informasi lainnya diperoleh Kepala

---

<sup>36</sup> Depdiknas. 2001 b. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas. h.17

Sekolah, perwakilan guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa SDN megulung Lor termasuk dalam kategori baik. Perbedaan penelitian yang dilakukan Windi dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah objek yang di teliti pada tingkat Sekolah Dasar.

Penelitian yang serupa lainnya yaitu dilakukan oleh Hari Muswen NIM. 107018203474 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah FITK yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam peningkatan sarana prasarana Pendidikan di SMP Darussalam Ciputat Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif yang memaparkan peran komite sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana di SMP Darussalam Ciputat. Hasil penelitian ini lebih banyak dari dokumentasi dan interview dengan responden Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Wakasek Kurikulum. Kesimpulan dari penelitian ini belum optimalnya kinerja Komite Sekolah. Perbedaan penelitian yang dilakukan Haris dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah focus penelitiannya pada peningkatan sarana prasarana.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dede Evah Hudoefah NIM 107018201085 Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah FITK yang berjudul Peran Komite Madrasah Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Kepala Madrasah Di MI Miftahul Anwar Tapos Depok. Penelitian ini untuk mendeskripsikan peran komite dalam pencapaian kinerja kepala madrasah dengan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran komite sekolah dalam

mendukung kinerja kepala madrasah MI Miftahul Anwar Tapos Depok belum sepenuhnya berjalan baik. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu focus penelitian yang mendeskripsikan peran komite dalam mendukung kinerja kepala sekolah, dan objek penelitian pada tingkat satuan pendidikan MI.

Dari beberapa penelitian yang telah disampaikan diatas mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengenai Keterlibatan Masyarakat Dalam Pendidikan (Studi Khusus Peran Komite Di SMPN 15 Bnadar Lampung), akan tetapi yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada keterlibatan/hubungan yang dilakukan oleh komite sekolah yang tentunya sama sekali berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

